

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Transparansi pada sektor pemerintah sangat diperlukan guna fungsi pengawasan serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana yang berasal dari masyarakat dan tetap sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat hal ini demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sumber pendapatan dari anggaran berasal dari dana rakyat yaitu pembayaran pajak dan retribusi. Dana tersebut harus dikelola kepala daerah dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.(Febriyanti & Jatmiko, 2011).

Pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan. Pemerintah melakukan pengungkapan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan dalam meminimalisir asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan public sebagai tujuan pembangunan nasional semakin terdukung dengan adanya otonomi daerah (Noor, 2014).

Menurut laporan *Corruption Perceptions Index 2014* oleh *Transparency International Indonesia*, peringkat Indonesia menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur, dengan skor sebesar 34 telah mengalami peningkatan 2 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam mencegah dan memberantas korupsi. Walaupun telah mengalami peningkatan, tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi di Indonesia masih cukup tinggi.

Peningkatan transparansi dan ketersediaan informasi sektor publik di Indonesia makin berkembang setelah dikeluarkannya Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban dalam memberikan informasi publik secara lebih transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang dapat diakses dengan cepat, efisien, mudah dijangkau masyarakat dan mudah dipahami.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat pesat, hal ini telah berdampak sangat besar pada aktivitas manusia. Internet merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi yang pada saat ini, menawarkan suatu bentuk unik pengungkapan informasi kepada masyarakat luas sesegera mungkin dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Internet dianggap menjadi pemberi layanan yang potensial untuk dikembangkan kepada masyarakat karena

minatnya semakin meningkat tiap tahunnya, *website* dinilai sebagai inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan kuantitatif dan kualitatif pelayanan publik. (Noor, 2014).

Internet juga dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela dan konkrit dalam mewujudkan akuntabilitasnya (Febrianty & Jatmiko, 2011). Menyadari akan besarnya manfaat internet tersebut melahirkan solusi pelayanan publik yang selama ini terkesan kaku menjadi model baru melalui *e- Government*. *E-Government* mengurangi terjadinya pelayanan secara *face to face* sehingga menjadikan pelayanan menjadi lebih efisien dan fleksibel karena pengaksesannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Pengguna informasi kini dapat dengan cepat mencari, menyaring, mengunduh dan bahkan memberikan masukan terhadap sistem kinerja pemerintah hal tersebut dapat menimbulkan komunikasi yang baik antara aparatur pemerintah dan masyarakat demi kemajuan bangsa.

Kebijakan penerapan *e – Government* sudah tertuang dalam bentuk Intruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dimana menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah baik dari pusat hingga daerah membangun situs web nya masing-masing dalam upaya untuk memperkenalkan potensi daerahnya dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat hingga akhirnya mampu menjadi *good governance*. Penggunaan *e-Government* sebagai media

penyampaian informasi non- keuangan maupun keuangan, secara umum berisikan informasi umum tentang daerah, informasi kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan, dan sarana berkomunikasi interaktif dengan masyarakat dan informasi laporan keuangan. Internet merupakan sebuah implementasi penyederhanaan administrasi public dalam meningkatkan hubungan layanan pemerintah kepada masyarakat agar menjadi lebih efisien, modern dan mudah (Karniawati & Rahamadani, 2005).

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk penyampaian proses akuntansi tentang bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan agar mencapai tujuan ekonomi dan social Negara (Febriyanti & Jatmiko, 2011). Publikasi laporan keuangan pemerintah melalui *e-Government* yang kita kenal dengan *internet financial reporting (IFR)* merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat (Trisnawati & Achmad, 2014). Karena bersifat sukarela tidak semua pemda mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya, hal ini menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan pada tiap pemda padahal semakin tinggi pengungkapan informasi akan semakin mengurangi asimetri informasi dan kecurigaan penyimpangan anggaran dari pihak masyarakat.

Pasca terbitnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah diharapkan dapat

membantu mengurangi perbedaan kualitas dan informasi keuangan yang diungkapkan oleh tiap pemerintah daerah. Pada instruksi tersebut mewajibkan agar pemerintah daerah mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya. Keduabelas dokumen tersebut antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD.

Namun pada hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada awal September 2013 mengungkapkan bahwa ternyata mayoritas pemda masih enggan mempublikasikan pengelolaan anggaran pada situs resminya. Agustin (2014) telah melakukan penelitian serupa untuk membuktikan publikasi pengelolaan anggaran pada *website* pemda di Sumatera Barat namun hasilnya masih banyak pemda yang masih kurang dalam mewujudkan transparansi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan *IFR* pada *website* pemerintah. Di Indonesia dan luar negeri telah banyak dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktek *Internet Financial Reporting* pada *e-Government* seperti Alan & Mack (2007) ; Carlos, *et al.*,(2008) ; Laswad, *et al.*, (2005) ; Hilmi & Martani (2012) ; Aditya, *et al.*, (2014), dll namun hasil penelitian sebelumnya masih tidak

konsisten. Oleh sebab itu, peneliti tertarik ingin meneliti kembali pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *IFR*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya di bidang akuntansi mengenai pengungkapan informasi keuangan secara sukarela pada *e-Government*.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati & Achmad (2014) dalam menguji determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Kontribusi penelitian ini adalah menambah periode penelitian dan mengganti skala pengukuran variabel dari *dummy* menggunakan skala poin sehingga diharapkan penilaian variabel *IFR* dapat dinilai dan diklasifikasikan lebih detail lagi. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini akan membuktikan apakah kompetisi politik, ukuran pemda, *leverage*, kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Internet Financial Reporting (IFR)* Melalui *e-Government di Indonesia*”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *IFR* melalui *e-Government*?
- b. Apakah ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan *IFR* melalui *e-Government*?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *IFR* melalui *e-Government*?
- d. Apakah kekayaan pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan *IFR* melalui *e-Government*?
- e. Apakah tipe pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan *IFR* melalui *e-Government*?
- f. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *IFR* melalui *e-Government*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *internet financial reporting* melalui *E-Government* pada pemda di Indonesia.
2. Menghasilkan penerapan *Internet Financial Reporting* yang baik di dalam *E-Government* pada pemda di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan wacana dan memperkaya kajian teori determinan yang mempengaruhi pengungkapan *IFR* melalui *E-Government* pada pemda.

### 1.4.2 Manfaat Praktis:

#### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai determinan *IFR* melalui *E-Government* pada pemda di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya pada bagian keuangan agar lebih transparasi dalam menyampaikan informasi keuangan melalui *E-Government* agar meminimalisir terjadinya kecurigaan masyarakat dan terjadinya korupsi.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat tentang bagaimana kinerja pemerintah dalam memberikan



transparansi dan akuntabelitasnya. Banyak faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah yang nantinya masyarakat dapat menilai dan turut serta dalam membantu membawa bangsanya lebih baik.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Determinan yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap pengungkapan laporan keuangan hanya kompetisi politik, ukuran pemda, *leverage*, kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit.
2. Laporan keuangan yang akan diteliti yaitu laporan keuangan yang diterbitkan pemda pada tahun 2014 dan bukan merupakan pemda pemekaran minimal 3 tahun terakhir ini.